

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERAN BADAN HIPUN PEMEKONAN
DALAM PENETAPAN PERATURAN PEKON**
(Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
NURLELI

NPM : 1721020072

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.HI.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang menjadi wakil masyarakat di pemerintahan pekon dalam menyampaikan aspirasi yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah pekon dan sebagai mitra kerja Kepala Pekon dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. BHP terdiri dari penduduk pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara mufakat. Anggota BHP terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Tujuan pembentukan BHP adalah untuk memperkuat pemerintahan pekon serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila. BHP berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah pekon berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala pekon dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan peraturan Pekon diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006.

Skripsi ini mencoba untuk menggali mengenai penerapan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peran BHP dalam penetapan peraturan Pekon Di Banjar Agung Ilir baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam. Tujuan penelitian ini selain sebagai pemenuhan tugas yaitu untuk menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca akan pengetahuan mengenai Peran BHP. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun data primer diperoleh langsung dari Kantor Kepala Pekon Banjar Agung Ilir yang didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan data berupa *editing* (pemeriksaan data), *coding* (penanda data), *reconstructing* (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum sesuai pelaksanaan dalam penerapan yang ada di Banjar Agung Ilir dari isi pasal 3 yang mana memuat fungsi dari BHP itu sendiri dengan Prinsip Hukum positif dan Hukum Islam. Analisis fiqh siyasah yang diperoleh yaitu Peran BHP secara hukum positif sesuai dengan ajaran hukum Islam, dimana tujuannya untuk kemaslahatan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurleli
NPM : 1721020072
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPON Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2020



Nurleli
NPM 17210200

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus).

Nama : Nurleli
NPM : 1721020072
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Hervin Yoki Pradikta, M.HI.

NIP.198802182018011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)

Frank M. Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)" disusun oleh, Nurleli, NPM: 1721020072, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal:

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag (.....)
Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)
Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H (.....)
Penguji II : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H (.....)
Penguji III : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ ۞ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa': 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta Nadrawati AS dan Suhaimi Akil yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayangi ini. Kepada kakak perempuanku Pefi Nia S, Mertitu Putri, Letisia Suhandra yang selalu memberikan nasihat dan dukungannya kepadaku. Kepada Bayu Sugara terima kasih telah memberikan semangat dan motivasinya Kepadaku. Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nurleli, lahir pada tanggal 16 Juni 1999 di Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Anak dari pasangan Bapak Suhaimi dan Ibu Nadrawati. Pendidikan penulis dimulai dari Taman kanak-kanak Roudhatul Ulum, Way Jaha, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2004-2005, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Way Jaha, pada tahun 2005-2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2011-2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Pringsewu pada tahun 2014-2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPON Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Suhaimi dan Nadrawati AS, berkat doa restu dan semangat dari mereka berdua penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
7. Kakak tersayang, Pefi Nia S, Mertitu Putri, dan Letisia Suhandra, terimakasih atas semangat, motivasi dan dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
8. Teman Tercinta, Bayu Sugara, terimakasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis serta telah memberikan dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT.
9. Sahabat-sahabatku semasa kuliah, Yad, Pitri Ayu, Marina, Vera, Nadila yang telah memberikan motivasi, semangat, menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Oca Mutiara Savitri yang telah memberikan semangat, membantu, dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2017, khusus Siyasah E yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi ini.
12. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
13. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 2020

Nurleli
NPM 1721020072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Badan HIPPUN Pemekonan.....	25
1. Pengertian Badan HIPPUN Pemekonan	25
2. Tugas dan Wewenang Badan HIPPUN Pemekonan	26
3. Hak dan Kewajiban Badan HIPPUN Pemekonan	27
B. Fiqh Siyasah	29

1. Pengertian Fiqh Siyasah	29
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	33
C. Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Peraturan Daerah.....	38
D. Peraturan Tentang Otonomi Daerah.....	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Pekon Banjar Agung Ilir.....	47
2. Profil Pekon Banjar Agung Ilir.....	48
3. Keadaan Demografi Banjar Agung Ilir.....	49
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon	55
B. Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus.....	65
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon Di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
Lampiran 1	Instrumen Wawancara
Lampiran 2	Surat Izin Riset Di Pekon Banjar Agung Ilir
Lampiran 3	Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)
Lampiran 4	Surat Hasil Turnitin
Lampiran 5	Kartu Bimbingan/Konsultasi
Lampiran 6	Surat Izin Dinas Penanaman Modal
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara

DAFTAR TABEL

3.1	Jumlah Dusun Pekon Banjar Agung Ilir	51
3.2	Luas Wilayah Pekon Banjar Agung Ilir	52
3.3	Jumlah Penduduk Pekon Banjar Agung Ilir	52
3.4	Mata Pencaharian Pokok Pekon Banjar Agung Ilir	53
3.5	Agama Yang Ada di Pekon Banjar Agung Ilir	54
3.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Banjar Agung Ilir	54
3.7	Struktur Organisasi Aparatur Pekon Banjar Agung Ilir	57

DAFTAR GAMBAR

3.1	Bagan Struktur Lembaga Pekon Badan Hippun Pemekonan	57
-----	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Dengan jelas judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi Di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)”. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau ataupun dengan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) 58

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014) 4

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.VII, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018) 367

dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali kota).⁴

5. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.⁵
6. Badan HIPPUN Pemekonan merupakan lembaga legislatif di tingkat pekon yang menjadi wakil masyarakat di pemerintahan pekon dalam menyampaikan aspirasi yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah pekon dan sebagai mitra kerja Kepala pekon dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah pekon.⁶

Berdasarkan istilah dalam penegasan judul, maka judul penelitian menyatakan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi Di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Artinya, daerah memiliki kekuasaan sendiri untuk mengatur rumah tangganya.⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat Otonomi Daerah.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) 189

⁵ *Ibid.*, 219

⁶ Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan.

⁷ Ibnu Kencana Syafi'i, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) 55-56

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 11 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pekon terdiri dari Kepala Pekon dan Perangkat Pekon. Kepala Pekon merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan HIPPUN Pemekonan.⁸ Dengan kata lain bahwa Kepala Pekon merupakan pimpinan lembaga eksekutif pekon yang dibantu oleh anggota perangkat pekon yang telah dibentuk oleh Kepala Pekon untuk membantu menjalankan tugas-tugas Kepala Pekon.

Kepala Pekon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 14 ayat (1). Pada tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pekon seperti, pembuatan peraturan pekon, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar pekon. Pada tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, jembatan pekon, irigasi pekon, pasar pekon. Sedangkan pada tugas menyelenggarakan urusan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat. Kepala Pekon dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat pekon dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan dipekon.⁹

Perangkat pekon diantaranya adalah sekretaris pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan. Badan HIPPUN Pemekonan berfungsi

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pasal 11

⁹ Priyadi, Agus. "Peran Badan HIPPUN Pemekonan (Bhp) Gadingrejo Timur Dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (Apbpekon) Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. 1 (Desember 29, 2020): 9-35
<http://digilib.unila.ac.id/10322/14/BAB%20I.pdf>

menetapkan peraturan pekon bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi BHP dalam pembagunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah pekon.¹⁰ Badan HIPPUN Pemekonan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan pekon dan memberikan jalan bagi pemerintah pekon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 3 menyebutkan Badan HIPPUN Pemekonan ialah berfungsi menetapkan peraturan pekon bersama Kepala Pekon, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan suatu lembaga legislatif di tingkat Pekon sebagai lembaga perwakilan masyarakat pekon yang menjadi wahana untuk melaksanakan demokrasi dan sebagai penyelenggara pemerintahan pekon yang berkedudukan sebagai mitra sejajar dari pemerintah. Melalui BHP maka diharapkan segala masalah yang ada di masyarakat dapat tersalurkan, BHP sebagai pengawas dan mitra sejajar kepala pekon harus mampu menjadi jembatan penyalur kepada kepala pekon. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di pekon.¹¹ Peran BHP dalam penetapan peraturan pekon yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon; menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon. Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntut untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon.¹²

Mempelajari kinerja BHP haruslah diketahui ukuran keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Indikator atau ukuran

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 pasal 6 tentang *Badan HIPPUN Pemekonan*.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 pasal 6 tentang *Badan HIPPUN Pemekonan*.

kinerja itu tentunya dapat merefleksikan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari BHP. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja dari Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) sebagai mitra dari pemerintah desa adalah keberhasilan dari BHP dalam menjalankan tupoksi dan wewenang yang telah diamanahkan dalam pembuatan peraturan pekon.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, ukuran keberhasilan kinerja BHP dalam pembuatan peraturan pekon adalah sejauh mana BHP dapat menjalankan tupoksi dan wewenangnya dalam pemerintahan pekon, sehingga dalam penelitian ini akan terlihat keefektifan dan efisiensi BHP sebagai mitra sejajar dari kepala pekon dalam pembuatan peraturan pekon.

Badan HIPPUN Pemekonan di Pekon Banjar Agung Ilir sendiri belum sesuai, melihat dari salah satu Peraturan Pekon yang sudah diterapkan yakni perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketika masa pandemi ini, dalam peraturan pekon tersebut dijelaskan untuk kategori orang-orang yang berhak menerima bantuan tersebut, seperti keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), namun nyatanya masih saja sebagian dari masyarakat pekon Banjar Agung Ilir mengeluhkan karena kurangnya pemerataan bagi penerima bantuan. Ketika peneliti melakukan wawancara singkat dengan salah satu warga, beliau mengatakan bahwa “sudah mengajukan dan memberikan aspirasinya namun sampai saat ini tidak ada kelanjutan ataupun konfirmasi, padahal beliau termasuk dalam kategori penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut.” Selain itu masyarakat juga banyak yang mengeluhkan tentang Pekon Banjar Agung Ilir baik dari segi pembangunannya juga, seperti pembangunan Balai Desa yang sampai saat ini belum juga selesai.

Mengenai jabatannya sebagai ketua Badan HIPPUN Pemekonan juga tidak melaksanakan salah satu tugasnya yakni menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang dirapatkan

¹³ Diana, Nur. “Kinerja Anggota Badan HIPPUN Pemekonan (Bhp) Kamilin Dalam Pembuatan Peraturan Pekon Tahun 2015”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no.1 (Desember 7,2020):57-67
<http://digilib.unila.ac.id/12859/5/DAFTAR%20ISI.pdf>

bersama Kepala Pekon dan Jajarannya. Dalam hal ini mengingat bahwasannya tugas dan fungsi BHP itu sendiri sangat berpengaruh dalam penetapan peraturan Pekon dan sebagai penampung aspirasi.¹⁴ Bagi Penulis sangatlah tidak wajar karena BHP banyak ikut andil dalam penetapan peraturan Pekon. Maka dari itu Penulis sangat tertarik untuk melakukan Penelitian lebih dalam dengan masalah yang ada di Pekon Banjar Agung Ilir ini.

Mengingat bahwasanya tugas dan fungsi BHP itu sendiri sangat berpengaruh dalam penetapan peraturan pekon dan penampung aspirasi, bagi penulis sangatlah tidak wajar karena BHP sendiri pun ikut andil dalam penetapan peraturan di sebuah pekon dan menjadi jalur penyampai aspirasi dari warganya. Maka dari itu penulis sangat tertarik dengan masalah ini.

Adapun dalam peradilan Islam, Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).¹⁵ Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.¹⁶

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 3 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

¹⁵ A.Djazuli. 2009. *FiqhSiyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. Ed. Rev. Cet.4; 284

¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002. 171

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan 59, Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN



“ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59)

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam *nash Al-Qur'an* dan *Sunnah*, Undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya

dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi *Shollallahu Alaihi Wassalam*. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus) dan yang menjadi sub-fokus penelitian ini adalah Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan yang ada di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan Peraturan Pekon Di Pekon Banjar Agung Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon Di Pekon Banjar Agung Ilir ?

¹⁷ Iqbal,Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Group. 2014. 155

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang:

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan Peraturan Pekon Di Pekon Banjar Agung Ilir.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan Peraturan Pekon Di Pekon Banjar Agung Ilir.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Siyasah.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dilakukan agar penulis mengetahui hal-hal apa yang diteliti dan apa yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan penelitian penulis, terkait dengan pembahasan tentang "Implementasi Pasal 3 Peraturan

daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam Penetapan Peraturan Pekon”. Yaitu :

1. Karya Tislam Nur Karin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi yang berjudul *“Disharmonisasi Antar lembaga Pekon (Studi Kasus Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”*.¹⁸ Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi ini. Persamaan tersebut terletak pada objek yang diteliti yaitu Lembaga Badan HIPPUN Pemekonan dan Kepala Pekon. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan yang pertama, adanya disharmonisasi hubungan kerja antara Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan Banjarsari mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada tahap evaluasi keduanya tidak menunjukkan hubungan kerja yang baik seperti, tidak adanya kerjasama, perbedaan pendapat masing-masing pihak, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, BHP lebih menjalankan fungsi *controlling* dan kurang dalam menjalankan fungsi mitra bersama Kepala Pekon, intensitas pertemuan yang sangat minim, kurangnya keterbukaan. Perbedaan dengan skripsi ini ialah Lokasi penelitian dan pembahasan yang lebih mengerucut dalam membahas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus pasal 3 Nomor 13 tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan.¹⁹
2. Karya Maulana Rendra Yuda, Mahasiswa Universitas Lampung, skripsi yang berjudul *“Penerapan Fungsi*

¹⁸ Karin, Nur Tislam. “Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon (Studi Kasus Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”. *Jurnal Pemikiran Politik Islam* (Juni 12, 2017) 44-52

¹⁹ Karin, Nur Tislam. “Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon (Studi Kasus Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”. *Jurnal Pemikiran Politik Islam* (Juni 12, 2017) 37-55

Legislasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”. Pada Penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi ini. Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu Lembaga Badan HIPPUN Pemekonan. Dan, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa dilihat dari dua tahap yaitu proses menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi dan penyaluran aspirasi dapat dilihat dalam proses pembuatan peraturan desa yaitu pada tahap perancangan, pembahasan dan penetapan peraturan desa. Perbedaan dengan skripsi ini adalah Lokasi Penelitian dan pembahasan yang lebih mengerucut dalam membahas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus pasal 3 Nomor 13 tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan.²⁰

3. Karya Agus Priyadi, Mahasiswa Universitas Lampung, skripsi yang berjudul *“Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) GadingRejo Timur Dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014”*. Pada Penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi ini. Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu Peran Lembaga Badan HIPPUN Pemekonan. Dan, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BHP Gadingrejo Timur tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses penetapan dan Belanja Pekon (APBPekon) tahun 2014. Proses penetapan peraturan Pekon tersebut ditinjau dari 4 (empat) tahap yaitu

²⁰ Rendra Yuda, Maulana. “Penerapan Fungsi Legislasi Badan HIPPUN Pemekonan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu) Tahun 2015”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 52-70

Identifikasi masalah, agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan. Identifikasi masalah tidak dilakukan oleh BHP, selanjutnya tahap agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan seluruhnya didominasi oleh kepala Pekon tanpa melibatkan BHP. Tidak berperannya BHP disebabkan oleh hubungan kontravensi antara BHP atas dominasi yang dilakukan oleh Kepala Pekon. Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian dan pembahasan yang lebih mengerucut dalam membahas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus pasal 3 Nomor 13 tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan.²¹

Selama proses pengumpulan bahan pustaka, belum ditemukan yang secara khusus mengkaji masalah Implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 tentang peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan peraturan pekon. Adapun skripsi, jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang dimuat dalam surat kabar dan media sosial, hanyalah gambaran tentang peran Badan HIPPUN Pemekonan secara umum, sedangkan objek yang penulis teliti adalah Implementasi pasal 3 Peraturan daerah Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 tentang peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan peraturan pekon. Dalam hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatur yang berkaitan dengan Badan HIPPUN Pemekonan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan

²¹ Priyadi, Agus. "Peran Badan HIPPUN Pemekonan (Bhp) Gadingrejo Timur Dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (Apbpekon) Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. 1 (Desember 29, 2020): 9-35

informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²² Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kantor BHP yang ada di Pekon Banjar Agung Ilir.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data kemudian disimpulkan.²³ Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara dengan ketua BHP Pekon Banjar Agung Ilir.

b. Data sekunder

Merupakan data yang mengisi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

²² Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011) 106

²⁴ *Ibid* 175

kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi pada penelitian ini adalah Ketua BHP, Aparat Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus serta 110 masyarakat Pekon.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *random sampling* yaitu sampel yang anggota nya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti.²⁶ Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, jika subyeknya dibawah 100 maka diambil semua. Jika diatas 100, maka diambil 10%-15% atau lebih.²⁷

Sesuai penjelasan diatas, karena populasi nya lebih dari 100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 110, 2 dari pihak Pekon Banjar Agung Ilir dan 9 dari masyarakat.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden).²⁹ Dalam hal ini, penulis menanyakan secara lengkap mengenai Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan kepada pihak terkait dan masyarakat di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus.³⁰

²⁵ *Ibid.*, 176

²⁶ *Ibid.*, 176.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 104

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1998. 45

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 102.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013) 95.

b. Dokumentasi

Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas berkaitan dengan topic penelitian yang diambil melalui izin lapangan.³¹

c. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh indra. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui *interview*.³² Mengingat data yang didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti didalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh Badan HIPPUN PEMEKONAN PEKON BANJAR AGUNG IIIR Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugasnya yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*, 217

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1998. 57

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.³³
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).³⁴
 - c. Rekonstruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.³⁵
 - d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.³⁶
7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik *generalisasinya* sehingga mempunyai sifat umum.³⁷

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau

³³ Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013. 72-79

³⁴ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers, 2019. 110

³⁵ *Ibid.*, 200

³⁶ *Ibid.*, 203

³⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers, 2019. 200

peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik *generalisasinya* sehingga mempunyai sifat umum.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi: Pengertian Badan HIPPUN Pekonon, Tugas dan wewenang Badan HIPPUN Pekonon, Hak dan Kewajiban Badan HIPPUN Pekonon, Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Tentang Otonomi Daerah.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang Meliputi: Gambaran Lokasi Penelitian seperti, Kantor Badan HIPPUN Pekonon, Sejarah Pekon Banjar Agung Ilir, Letak Geografis, Keadaan Demografi, Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Banjar Agung Ilir, Peran Badan HIPPUN Pekonon dalam Penetapan Peraturan Pekon, Pendapat Anggota atau Pengurus dari badan HIPPUN Pekonon terhadap fungsi dan wewenangnya dalam penetapan peraturan Pekon di Banjar Agung Ilir.
4. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi: Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten

³⁸Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers, 2019. 200

Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi Di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus), Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon (Studi Di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus)

5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu simpulan, dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peran Badan HIPPUN Pemekonan yang ada di Banjar Agung Iir belum terlaksana dengan baik dan beberapa tugasnya pun belum sesuai sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Dimana Peran BHP dalam penampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan Pekon belum juga terlaksana dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dari setiap individu yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanahnya. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Pekon. Padahal aspirasi rakyat sangat dibutuhkan karena dengan memudahkan rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan yang ada, sehingga terjalin hubungan yang saling memahami antara kewajiban dan hak masing-masing.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan peraturan Pekon di Banjar Agung Iir mengkaji tentang negara dan perundang-undangan yaitu *Siyasah Dusturiyyah*, merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Dalam konsep teorinya *Fiqh Siyasah* terhadap penetapan peraturan Pekon juga tidak bertentangan dengan Sumber Hukum Islam yakni *Ijtihad* menggunakan landasan Hukum islam atau Kaidah Ushul Fiqh *al-maslahah al-Mursalah* dan *Al-Urf'* yang mana *al-maslahah*

al-Mursalah membahas tentang mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sedangkan *Al-Urf* ialah sesuatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan/atau hal meninggalkan sesuatu. Berkaitan dengan Implementasi Pekon maka demi kemaslahatan dibolehkan dan *Al-Urf* tidak bertentangan maka dibolehkan.

B. Rekomendasi

Atas penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Lembaga Pekon terkhususnya BHP dapat bekerja sama dan berkoordinasi baik dengan Aparat Pekon, BHP juga diharapkan agar lebih bertanggung jawab, dan kesadarannya dalam menjalankan tugas serta menjalankan amanahnya sebaik mungkin. Sehingga hal yang dianggap belum berhasil oleh masyarakat dapat diperbaiki kedepannya agar terwujudnya masyarakat Pekon Banjar Agung Ilir yang sejahtera.
2. Bagi BHP dan Masyarakat, di masa yang akan datang dapat menggunakan landasan Hukum Perspektif *Fiqh Siyasa* untuk mengambil keputusan, menetapkan dan melaksanakan suatu peraturan Pekon.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2019.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013.
- Amiruddin, Zainal Arifin Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2011
- Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ibnu Kencana Syafi'i, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Khairuddin, Iwan Satriawan. “Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945. Depok: Rajawali Pers, 2018

Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2006.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Syamsuddin, M. Din, and Abd Rohim Ghazali. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Cet.1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 12 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 31 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 tentang definisi Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 6 tentang Wewenang otonomi daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 32 tentang Kewajiban Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Hak atas Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pembagian Wilayah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang Fungsi Badan HIPPUN Pemekonan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 11 tentang Pemerintah Pekon terdiri dari Kepala Pekon dan Perangkat Pekon

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 10 Poin 4 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 3 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 4 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 5 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 8 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Sumber Jurnal

Diana, Nur. “Kinerja Anggota Badan HIPPUN Pemekonan (Bhp) Kamilin Dalam Pembuatan Peraturan Pekon Tahun 2015”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no.1 (Desember 7,2020):57-67
<http://digilib.unila.ac.id/12859/5/DAFTAR%20ISI.pdf>

Karin, Nur Tislam. “Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon (Studi Kasus Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”. *Jurnal Pemikiran Politik Islam* (Juni 12, 2017)
File:///G:/autorun.inf/skripsi%20BAB%201%20LELI/Skripsi_Lengkap_O_KE.pdf

Rendra Yuda, Maulana. “Penerapan Fungsi Legislasi Badan HIPPUN Pemekonan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi

Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu) Tahun 2015”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 52-70
<http://123dok.com/document/ozllkk2z-penerapan-legislasi-pemekonan-pembuatan-peraturan-kecamatan-kabupaten-pringsewu.html>

Priyadi, Agus. “Peran Badan HIPPUN Pemekonan (Bhp) Gadingrejo Timur Dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (Apbpekon) Tahun 2014”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. 1 (Desember 29, 2020): 9-35 <http://digilib.unila.ac.id/10322/14/BAB%20I.pdf>

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” Al Imarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No.1 (July 1, 2018): 18
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah,” Al Imarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, No. 1, (August 20, 2019): 83-88
<https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>

Wawancara

Wawancara Salim Akil , wawancara dengan penulis, Ketua BHP Pekon Banjar Agung Ilir, 5 Januari 2021

Wawancara Nurie Yawan, wawancara dengan penulis, Warga Pekon Banjar Agung Ilir, 5 Januari 2021.

Wawancara Intan Fatma Diani, wawancara dengan penulis, Aparat Pekon Banjar Agung Ilir, 5 Januari 2021.

Wawancara Kafi Mubaroq, wawancara dengan penulis, warga Pekon Banjar Agung Ilir , 5 Januari 2021.

Wawancara Megeas Deselpa, wawancara dengan penulis, warga Pekon Banjar Agung Ilir, 5 Januari 2021.

Wawancara Renvillia Adisti, wawancara dengan penulis, Warga Pekon Banjar Agung Ilir, 12 Januari 2021.

Wawancara Andriansyah, wawancara dengan penulis, selaku Sekretaris BHP Pekon Banjar Agung Ilir, 15 Januari 2021.

Wawancara Deden, wawancara dengan penulis, selaku salah satu Anggota BHP Pekon Banjar Agung Ilir, 15 Januari 2021.

